

BAB I

Pendahuluan

Procter & Gamble adalah salah satu produsen terbesar di dunia kosmetik, produk perawatan pribadi dan rumah tangga seperti sabun cuci, deterjen dan sampo. Perusahaan ini memiliki produk yang tercatat tersedia di lebih dari 180 negara, dan mengklaim untuk melayani sekitar 4,8 miliar pelanggannya di seluruh dunia. India dan China telah menjadi pasar yang semakin penting bagi P&G yang mana pada tahun 2012 terdapat laporan tentang akan dilakukannya pembangunan pabrik larges manufaktur di India pada tahun 2014 untuk menghasilkan laundry, produk pribadi dan perawatan bayi, dan terbukti pasar P&G pada tahun 2014 bersaing dengan *Nestle* dan ITC sebagai tiga perusahaan manufaktur terbesar di India.¹

Produk-produk yang dihasilkan oleh *Procter & Gamble* diketahui mengandung turunan minyak sawit yang meliputi produk Pampers; deterjen seperti Ariel, Dash, Lenor, Ace, Tide, Dawn, Wella; Head & Shoulders untuk produk rambut; dan gel cukur Gillette dan Mach. Di balik kesuksesan pasar yang telah diraih oleh P&G saat ini, sebuah gerakan environmentalis yaitu Greenpeace menemukan kejanggalan terkait dengan pemasok bahan baku dari produk-produk mereka. Seperti yang telah diketahui, produk-produk P&G menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit, yang ternyata berasal dari perusahaan-perusahaan pemasok yang mengambil minyak kelapa sawit dari perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, yaitu di Kalimantan dan Sumatera. Greenpeace menemukan kejanggalan bahwa dibalik pasokan minyak kelapa sawit tersebut, tidak semuanya bersertifikat sehingga Greenpeace mengindikasikan adanya pembukaan lahan tanpa ijin serta deforestasi.

¹http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-10-29/news/55559095_1_nestle-india-gillette-india-procter-gamble-health-hygiene diakses pada 12 Oktober 2015, pukul 10.35

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan sawit perusahaan P&G dari 2012-2013 terhitung sebesar 462 ribu ton, dan dari sejumlah tersebut ternyata hanya 10 persen yang bersertifikat. Sisanya, 90 persen terindikasi merusak hutan dan tidak terlacak. Untuk itu, sebagai produsen global, Greenpeace mengajak P&G agar menggunakan posisi demi penyelamatan hutan dengan memakai sawit dari sumber-sumber bertanggungjawab dan terlacak.²

Namun, diketahui bahwa pemasok *Procter & Gamble* memiliki basis di daerah-daerah berisiko tinggi di Indonesia termasuk Riau, Kalimantan Barat dan Tengah, dan Papua. Operasi mereka kemudian makin lama meluas dari yang sebelum sebelumnya, sampai akhirnya mencapai Afrika. Berbicara mengenai konsumsi minyak sawit: *Procter & Gamble* menggunakan total 462,000t produk kelapa sawit di tahun 2012-13 (352,000t minyak inti sawit [PKO], 20,000t crude palm oil [CPO] dan 90,000t turunan kelapa sawit lainnya), yang hanya kurang dari 10% (38,000t) yang bersertifikat oleh *Mass Balance* atau *Book and Claim*(GreenPalm).³

Dari penelusuran Greenpeace terhadap beberapa pemasok P&G memperlihatkan terjadinya pembukaan hutan sehingga memperluas deforestasi, seperti pasokan dari BW Plantation, Kuala Lumpur Kepong (KLK), dan Musim Mas. Penyelidikan Greenpeace mengidentifikasi tidak hanya deforestasi namun juga isu-isu bermasalah lain yang terhubung ke pemasok ini baik secara langsung maupun melalui pemasok pihak ketiga. Sesuai dengan Laporan Kemajuan Perusahaan ACOP 2013, produksi tahunan yang dilakukan oleh BW Plantation pada tahun 2012 adalah mencapai total 125.196 ton CPO dan 21.645 ton inti sawit. Namun, Laporan Kemajuan ACOP menyatakan bahwa sebanyak 110.711 ton CPO yang

²Greenpeace. 2014. Rahasia Kotor Procter & Gamble http://issuu.com/greenpeacesea-indonesia/docs/rahasia_kotor_procter_gamble. 19 Oktober 2015 pukul 22.03 hlm 7

³*ibid*

diproduksi oleh BW Planation sepanjang tahun 2011-2012 tidak bersertifikat sehingga mengindikasikan adanya deforestasi hutan. Sedangkan kasus Kuala Lumpur Kepong (KLK), kelapa sawit yang mereka produksi pada tahun 2012-2013 adalah sebesar 933.463t dan hanya 437.600t yang bersertifikat RSPO, selain itu mereka diindikasikan melakukan deforestasi karena pada Juli 2013 Polri menyatakan bahwa PT. Adei milik KLK bersama dengan konsesi lainnya dinyatakan dengan sengaja menyulut api di hutan sehingga terjadi kebakaran, maka dari itu Kuala Lumpur Kepong (KLK) yang merupakan pemasok untuk *Procter & Gamble* dinyatakan melakukan deforestasi. Sedangkan Musim Mas, dikatakan bahwa lahan milik mereka merupakan habitat asli orang utan dan harimau Sumatera.⁴

Hutan di Sumatera, khususnya Riau memiliki sekitar 40% karbon dari lahan gambut di Indonesia dan sekitar 1/5 dari sisa hutan tersebut merupakan habitat harimau Sumatera dan juga orang utan yang mana sebagian besar wilayah hutan tersebut merupakan wilayah provinsi yang menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sehingga, jika adanya pembukaan lahan, maka habitat harimau sumatera dan orangutan akan semakin berkurang. Berkurangnya habitat harimau sumatera dan orangutan tersebut tentu berdampak pada kelangsungan hidup mereka. Dilaporkan oleh BBC Indonesia, bahwa sekarang jumlah harimau sumatera hanya tersisa sekitar 400-an ekor. Sedangkan, populasi orangutan sumatera menurut IUCN hanya tersisa sekitar 6500-an ekor dan akan terus berkurang seiring dengan berkurangnya habitat mereka akibat konversi lahan ke hutan kelapa sawit.⁵

Selain berdampak pada kelangsungan hidup satwa-satwa, adanya deforestasi ini juga menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan. Lahan gambut yang merupakan tempat tumbuhnya kelapa sawit memiliki kandungan karbon yang besar, sehingga adanya ekspansi perkebunan yang berlangsung menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan yang tentunya

⁴*Ibid*, hlm 8

⁵http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/02/150205_harimau_sumatera_lingkungan diakses pada 12 Oktober 2015, pukul 10.50

sangat merugikan dan disayangkan, contohnya adalah adanya emisi gas rumah kaca (terutama CO², N²O, dan CH⁴). Lahan gambut juga memiliki peran penting dalam mencegah banjir sehingga jika deforestasi terjadi maka wilayah tersebut akan mudah terkena banjir.⁶

Pada dasarnya *Procter & Gamble* adalah inti dari sebagian besar permasalahan penebangan hutan yang tidak terkendali di Sumatera. Meskipun P&G tidak langsung melakukan hal tersebut, melainkan meminta pihak ketiga untuk melakukannya. Tuntutan pasar yang semakin banyak berefek pada tuntutan produksi. Hutan yang merupakan rumah bagi hewan lokal diganti menjadi hutan kelapa sawit. Hewan lokal terancam dengan hilangnya habitat mereka dan sampai membuat mereka berpindah ke pemukiman warga.

Greenpeace sebagai gerakan kaum environmentalis global yang didirikan di Vancouver, British Columbia, Kanada pada tahun 1971. Adanya gerakan ini dimulai dari sekelompok nelayan yang berlayar di Vancouver yang mana mereka mulai ingin melakukan adanya perubahan karena adanya kerusakan yang timbul di pulau kecil di lepas pantai Alaska karena percobaan nuklir yang dilakukan oleh AS. Sejak saat ini, gerakan ini menjadi semakin berkembang dan memiliki banyak pengikut, mereka yang sekarang lebih terfokus pada kerusakan-kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh manusia serta isu-isu terkait dengan pemanasan global.⁷

Banyak pencapaian yang telah diraih oleh Greenpeace dalam beberapa dekade ini, beberapa diantaranya adalah membentuk persatuan eksportir beras Thailand yang berkomitmen hanya melakukan ekspor beras yang bebas dari rekayasa genetik pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, Greenpeace berhasil menekan Senator di Filipina untuk

⁶Wibowo, Ari. *Januari 2009*, "PERAN LAHAN GAMBUT DALAM PERUBAHAN IKLIM GLOBAL". Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman, http://forda-mof.org/files/Tekno_HT_2.1.2009-3.Ari_Wibowo.pdf, 11 Oktober 2015

⁷<http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/sejarah-greenpeace/> diakses pada 18 Oktober 2015, pukul 11.55

meluluskan pendanaan untuk Energi Terbarukan, dan undang-undang energi terbarukan, seperti energi angin dan matahari, untuk menjaga keamanan energi dan memerangi perubahan iklim.⁸

Seperti yang telah diketahui, Greenpeace telah membuktikan posisi mereka sebagai gerakan environmentalis yang cukup memiliki tempat di dunia ini sehingga kasus deforestasi yang diindikasikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh P&G ini merupakan kasus yang wajib mereka tangani sebagai organisasi gerakan peduli lingkungan. Maka dari itu, mereka melakukan berbagai tindakan dan kampanye untuk membuat P&G menghentikan aksi deforestasi mereka.⁹

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tindakan Greenpeace untuk menekan *Procter & Gamble* agar menerapkan nol deforestasi?

C. Teori

Konsep Jaringan Advokasi Transnasional (TAN)

Jaringan Advokasi Transnasional merupakan sebuah konsep organisasi yang memiliki karakteristik pertukaran serta sebuah pola komunikasi yang mana dalam melakukan pergerakan, mereka biasanya bersifat sukarela, memiliki timbal balik, dan bersifat sejajar. Konsep jaringan yang mereka lakukan biasanya menekankan pada hubungan yang terbuka diantara aktor-aktor yang berpengaruh dalam isu tertentu, dalam hal ini adalah Greenpeace yang berusaha muncul di tengah-tengah kasus P&G. menurut Keck & Sikkink, mereka disebut sebagai jaringan advokasi karena mereka mengadvokasi suatu itu yang diajukan oleh

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

sebuah pihak. Keck & Sikkink juga menyatakan bahwa jaringan advokasi transnasional memiliki cara yang unik dalam melakukan pengadvokasian mereka seperti dengan memaparkan isu yang dibahas, mengungkapkan ide-ide mereka terhadap isu tersebut, memperjelas isu-isu yang terjadi dengan membandingkan dengan norma-norma yang berlaku yang tentu saja bertentangan, serta melibatkan individu lain dalam hal ini masyarakat umum untuk mendapat dukungan penuh atas proses advokasi mereka tersebut. Para aktor TAN biasanya fokus kepada isu-isu hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pada kasus ini, Greenpeace sebagai aktor TAN fokus kepada isu lingkungan yang mana merupakan kasus deforestasi yang dilakukan oleh P&G terhadap hutan-hutan di Sumatera.¹⁰

Dalam konsep TAN, para aktor (NGO) tidak bekerja sendiri namun juga dibantu oleh aktor-aktor lain yang memiliki tujuan yang sama yaitu sebuah perubahan terhadap kebijakan yang menurut mereka menyalahi aturan norma. Tidak tanggung-tanggung, NGO pun bergerak hingga keluar batas negara seperti Greenpeace pun juga seperti itu. Keck & Sikkink menemukan bahwa baik NGO internasional atau domestik, keduanya sama-sama memainkan peran besar sebagai inisiator aksi-aksi mereka dan menekan aktor-aktor lain yang memiliki *power* yang berlebih. Namun, cara NGO yang cukup mulus dengan memperkenalkan ide-ide baru, memberikan penjelasan dan informasi lengkap, serta melakukan berbagai lobi membuat NGO selalu berhasil untuk mengubah suatu kebijakan. NGO dalam konsep TAN tidak mengandalkan kekuatan fisik seperti militer atau kekuatan ekonomi seperti suap, karena memang mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hal-hal tersebut.¹¹

Jaringan advokasi transnasional dari masa ke masa menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak memiliki *power* dalam artian fisik, namun mereka terbukti merupakan suatu

¹⁰ E. Keck, Margaret, & Sikkink, Kathryn. (1998). *Activists Beyond Borders*, United States of America: Cornell University Press, hlm 5-6

¹¹ *Ibid*, hlm 8

aktor yang tidak bisa dianggap remeh karena perkembangan mereka hingga saat ini, sudah banyak isu-isu yang mereka usung yang mana berdampak terhadap perubahan kebijakan karena cara mereka menyampaikan isu tersebut kepada publik yang diproduksi secara cepat, disusun secara akurat, serta disebarakan secara efektif. Cara mereka berkampanye yang mengusung latar belakang khusus, seperti contohnya Greenpeace sendiri yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan, hal itu lah yang membuat jaringan advokasi transnasional ini dibidang unik. Jaringan advokasi transnasional juga sebagai jembatan, ketika para masyarakat sipil tidak bisa memberikan masukan untuk pembuatan kebijakan atau menyaksikan langsung proses pembuatan kebijakan tersebut.¹²

Dalam konsep jaringan advokasi transnasional, NGO yang melakukan advokasi terhadap suatu isu terkadang mengalami kendala. Salah satu contohnya adalah ketika yang melakukan pelanggaran adalah pemerintah, maka tidak mudah bagi NGO tersebut untuk membuat pemerintah mengakui kesalahannya dan memperbaiki kebijakannya, maka dari itu NGO juga membuat koneksi internasional. Koneksi yang dibuat NGO bisa dengan sesama NGO antar negara, bisa juga membuat koneksi dengan pemerintah dari negara lain. Koneksi inilah yang kemudian memperkuat NGO dalam konsep jaringan advokasi transnasional untuk kemudian menekan pemerintah yang dianggap bersalah agar memperbaiki kebijakan yang sekiranya merugikan.¹³

Melihat *caranon-state actors* bekerja, Keck & Sikkink menyatakan bahwa mereka pada dasarnya mereka berusaha menggunakan jalan yang sama seperti kelompok sosial dan kelompok politik pada umumnya untuk mempengaruhi norma yang berlaku. Namun, karena mereka tidak memiliki *power* yang paten, maka mereka harus mempengaruhi pihak yang berkuasa dengan mencari dukungan dari masa yang banyak menggunakan kemampuan

¹²*Ibid, hlm 9*

¹³*Ibid hlm 11*

mereka dalam mencari informasi, ide, serta membuat strategi yang tepat. Salah satu caranya yaitu dengan memaparkan informasi-informasi terkait dengan isu yang diusung terhadap pihak yang ingin mereka rekrut. Pada umumnya, *non-state actors* melakukan promosi isu dengan cara sosialisasi, persuasi, atau jika sudah tidak ada metode lain mereka menggunakan tekanan terhadap pihak-pihak yang berpengaruh.¹⁴

Dalam menjalankan strategi mereka, *non-state actors* memiliki beberapa tahap yang biasanya mereka gunakan. Pertama adalah *information politics* yaitu keahlian dalam mencari informasi dengan cepat dan berdasarkan fakta-fakta yang relevan yang dapat digunakan untuk kepentingan politik serta menimbulkan dampak yang besar. Kedua adalah *symbolic politics* yaitu kemampuan mereka untuk melakukan aksi-aksi simbolis yang dapat menjelaskan mengenai isu yang diangkat kepada pihak-pihak jarak jauh. Ketiga adalah *politics leverage* yaitu kemampuan untuk mengajak aktor-aktor yang berpengaruh dan *powerful* untuk mendukung isu yang diangkat agar dapat digunakan untuk menekan pihak berpengaruh yang lainnya. Tahap yang terakhir adalah akuntabilitas politik yaitu usaha mereka untuk mempertahankan aktor-aktor yang berpengaruh tersebut agar tetap menjalankan kebijakan dan memegang prinsip-prinsip yang telah disetujui.¹⁵

D. Hipotesa

Greenpeace menekan *Procter & Gamble* agar menerapkan nol deforestasi dengan memakai metode-metode sesuai dengan konsep jaringan advokasi transnasional yang mana memiliki beberapa tahap, yaitu:

¹⁴*Ibid* hlm 12

¹⁵*Ibid*, hlm 13-16

1. Mengumpulkan informasi serta bukti-bukti mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh P&G terkait dengan deforestasi dan pembukaan lahan, lalu menyampaikannya kepada publik
2. Membentuk simbol-simbol atau kegiatan kampanye tentang darimana sebenarnya pasokan minyak kelapa sawit P&G dan dampak negatifnya terhadap hutan di Sumatera untuk mendapatkan perhatian masyarakat.
3. *Politic leverage*, yaitu mengajak aktor nasional atau internasional yang berpengaruh agar turut memberikan perhatian terhadap isu ini seperti aktor pemerintah dari suatu negara atau bisa juga seorang publik figur yang dikenal oleh masyarakat luas.
4. Jika hal-hal tersebut sudah membuat P&G merasa jera dan berniat mulai menerapkan kebijakan nol deforestasi, maka dalam prosesnya Greenpeace harus melakukan akuntabilitas politik yaitu memantau terus kegiatan P&G untuk memastikan mereka tetap menerapkan kebijakan nol deforestasi seterusnya.

E. Tujuan Penelitian

1. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan hutan di Sumatera saat ini.
1. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara P&G untuk memonopoli hutan (terutama kelapa sawit) di Sumatera.
2. Tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu peran gerakan environmentalis (terutama Greenpeace) dalam menangani kasus tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam menulis tulisan ini, penulis menggunakan metode literatur yaitu dengan cara mencari sumber-sumber bacaan baik itu dalam berbentuk buku cetak ataupun dalam bentuk file yang terdapat di internet.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis memberi batasan penelitian yaitu hanya di dalam lingkup wilayah hutan di Indonesia. Meskipun fokus tulisan ini adalah hutan di Sumatera dan korporasi *Procter & Gamble* namun tidak memungkiri akan membicarakan hutan di wilayah lain di lingkup Indonesia serta korporasi lain yang melakukan pelanggaran yang sama untuk dijadikan sebagai contoh maupun acuan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, menjelaskan latar belakang bagaimana P&G dapat dianggap melakukan deforestasi hutan di Sumatera.

Bab II, menjelaskan apaitu Greenpeace, sejarah Greenpeace, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Greenpeace.

Bab III, menjelaskan keadaan hutan di Indonesia khususnya di Sumatera, habitat harimau dan orang utan disana, dan kronologi deforestasi oleh P&G

Bab IV, menjelaskan tahap-tahap kampanye Greenpeace, bukti-bukti yang menunjukkan kampanye, serta sikap P&G terhadap tuntutan Greenpeace.

Bab V, merupakan kesimpulan.